

POTENSI DAN KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN PASURUAN

Oleh
Ida Nuraini, SE, MSi

Abstrak

Penelitian ini berusaha melihat potensi dan ketimpangan ekonomi antar kecamatan yang ada di kabupaten Pasuruan. Fokus penelitian ini antara lain adalah: 1. Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, 2. Potensi ekonomi masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, dan 3. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Hasil analisis dari ketiga fokus penelitian diatas diharapkan mampu memberi masukan bagi pemerintah daerah Pasuruan untuk mengatasi tingkat kesenjangan antar kecamatan di wilayah kabupaten Pasuruan dengan berbagai pilihan kebijakan-kebijakan strategis.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Analisis Location Quotient (LQ), 2. Analisis Tipologi Klassen, dan 3. Analisis Distribusi Frekuensi. Dari hasil analisis dengan ketiga alat tersebut diperoleh hasil, antara lain: Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, pola pertumbuhan ekonomi masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan dapat diidentifikasi sebagai berikut: a) Kecamatan yang tergolong "kecamatan relatif tertinggal"; terdapat lima kecamatan b) Kecamatan yang tergolong "kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh" terdapat enam kecamatan; c) Kecamatan yang tergolong "kecamatan berkembang cepat" terdapat delapan kecamatan; dan d) Kecamatan yang tergolong "kecamatan maju tapi tertekan" terdapat empat kecamatan.

Berdasarkan analisis sektoral, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kecamatan di Kabupaten Pasuruan adalah sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Namun apabila dilihat dari kontribusi berdasarkan kelompok sektor ekonomi, ternyata kelompok sektor sekunder dan primer yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan

Sedangkan kecamatan yang paling banyak mempunyai sektor unggulan adalah Kecamatan Purwoasri, Prigen, Pandaan, Kraton, dan Gondangwetan. sedangkan Kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor unggulan adalah: Kecamatan Gempol dan Bangil.

Selain itu ditemukan pula bahwa pertumbuhan ekonomi yang

terjadi di Kabupaten Pasuruan selama selama menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan perkapita per kapita antar kecamatan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya jumlah kecamatan (17 kecamatan) yang masih mempunyai tingkat pendapatan dengan kategori rendah dan sangat rendah.

Kata Kunci: Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kecamatan, Potensi Ekonomi.

Latar Belakang

Dalam proses pembangunan yang berorientasi otonomi daerah, berarti penyerahan proses pembangunan secara utuh kepada daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, dalam pemabangunan ekonomi masih diperlukan intervensi pemerintah. Menurut Keynes (1936), intervensi pemerintah diperbesar pada waktu perekonomian dalam keadaan *slump* dan dikurangi pada waktu *boom*. Terdapat tiga fungsi pemerintah dalam pembangunan ekonomi yaitu: 1) menyediakan *publike goods*, 2) fungsi pengaturan atau *regulatory* dan 3) melaksanakan *auditing*. Dalam perekonomian modern peran pemerintah secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan: 1) Peran lokasi, yaitu peran pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi, 2) Peran distribusi dan 3) Peran stabilisasi (Mangkoesoebroto, 1999).

Sedangkan menurut Blakely, (1994), peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah adalah: 1) *Entrepreneur*, yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merangsang jalannya suatu usaha bisnis, 2) Koordinator, yaitu pemerintah daerah sebagai koordinator dalam penataan suatu kebijakan atau strategi-strategi bagi pembangunan daerah, 3) Fasilitator, yaitu pemerintah dapat memepercepat pemabngunan melalui perbaikan lingkungan *attitudional* di daerahnya, 4) *Stimulator*, yaitu pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi investor baru agar masuk dan mempertahankan serta menumbuh kembangkan investor yang telah ada di daerahnya.

Pada umumnya inti dari teori pembangunan daerah berkisar pada dua hal pembahasan yaitu: 1) Pembahasan tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah, dan 2) teori yang membahas faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut Arsyad (1996) faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah adalah: sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, *entrepreneur*, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pembangunan.

Relevansi uraian diatas terhadap pemabangunan daerah di

Kabupaten Pasuruan adalah diperlakukannya Pemerintah Daerah Pasuruan untuk mengkaji ulang dalam menentukan strategi kebijakan pembangunan daerahnya. Mengingat Kabupaten Pasuruan apabila dilihat dari Produk Domestik Regional Brutonya (PDRB) merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai PDRB yang cukup besar diantara Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Jawa Timur. Dari 37 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, kabupaten Pasuruan termasuk 5 (lima) kabupaten/kota yang PDRB nya paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Berikut adalah kabupaten/kota di Jawa Timur yang PDRB nya tergolong tinggi.

Tabel 1.

Peringkat PDRB Tertinggi Lima Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 1998 – 2002

No.	Kabupaten/ Kota	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)				
		1998	1999	2000	2001	2002
1	Surabaya *	28.100,72	30.468,91	34.601,71	40.206,05	47.397,17
2	Kediri *	13.491,32	14.327,62	15.704,94	17.825,18	20.258,65
3	Sidoarjo	11.134,47	12.213,72	13.948,41	16.168,17	19.182,46
4	Gresik	6.933,24	7.866,23	9.248,65	10.907,08	12.762,10
5	Pasuruan	6.121,06	6.859,35	7.685,34	8.952,47	10.403,44

Sumber : BPS Jawa Timur

Keterangan : * – Kota

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat PDRB kabupaten Pasuruan menduduki peringkat ke 5 dari kabupaten/kota yang PDRB nya paling tinggi di Propinsi Jawa Timur. Namun tingginya PDRB kabupaten Pasuruan ternyata diikuti pula oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Pasuruan. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin yang ada di kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasuruan Tahun 1996 - 2002

Tahun	Kategori Kemiskinan	
	Kategori 2 dan 3	Kategori 1, 2, 3
1996	122.827	169.800
1997	136.448	217.284
1998	151.579	278.046
1999	257.373	355.800
2000	254.351	361.256
2001	289.538	372.420
2002	286.138	368.047

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

Keterangan: Kategori 1 = Penduduk mendekati miskin Kategori 2 = Penduduk miskin
Kategori 3 = Penduduk sangat miskin

Data di atas menunjukkan selama kurun waktu 1996–2002 jumlah penduduk miskin di kabupaten Pasuruan kecenderungannya semakin meningkat. Peningkatan tersebut baik dilihat dari kategori 2 (penduduk miskin) dan kategori 3 (penduduk sangat miskin), maupun kategori 1 (penduduk mendekati miskin).

Kondisi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan atau aktivitas ekonomi ekonomi yang tinggi di kabupaten Pasuruan tidak diikuti dengan pemerataan. Dalam konteks ruang (spasial) ketidak merataan pertumbuhan ekonomi bisa disebabkan oleh tidak meratanya potensi setiap daerah (kecamatan) yang ada di kabupaten Pasuruan. Potensi kecamatan dalam hal ini bisa dilihat dari potensi sektor/komoditi ekonomi yang dihasilkan maupun potensi sarana dan prasaran yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

RUMUSAN MASALAH

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh adanya kecenderungan meningkatnya jumlah keluarga miskin di kabupaten Pasuruan, seperti di uraikan dalam latar belakang, maka diperlukan strategi kebijakan baru bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan khususnya dalam mengatasi tingkat kesenjangan antar kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis tersebut diperlukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan.
2. Bagaimana potensi ekonomi masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan.
3. Apakah ada ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya teori pembangunan ekonomi secara nasional mempunyai definisi dan tujuan yang sama dengan teori pembangunan ekonomi daerah. Perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkup wilayahnya, oleh sebab itu sebelum membahas masalah pembangunan daerah ada baiknya dibahas terlebih dahulu pengertian daerah (regional). Daerah adalah suatu areal geografis yang merupakan suatu kesatuan. Pada intinya, ada tiga konsep daerah, yakni daerah homogen, daerah nodal, dan daerah administratif.

Daerah homogen adalah suatu daerah gabungan beberapa areal geografis yang memiliki karakteristik yang sama, walaupun letaknya secara fisik tidak ersebelahan. Daerah nodal adalah areal-areal yang strukturnya terdiri atas areal inti dengan areal-areal sekitarnya yang

melengkapi, yang terpadu, dalam arti ekonomi, dengan areal inti itu. Sedangkan daerah administratif adalah kesatuan administratif atau politik pemerintahan. Di Indonesia daerah administratif dikenal sebagai propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Daerah yang paling tepat untuk keperluan pembangunan daerah adalah daerah nodal, tetapi justru kurang dikembangkan di berbagai negara (Soepono, 1999).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Masalah pokok dalam pemabangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pemabangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogeneous development*) dengan menggunakan potensi seperti; sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah), enterpreneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Dalam upaya mengatasi masalah pokok dalam proses pembangunan daerah maka muncul teori-teori pembangunan daerah. Pada hakikatnya inti dari teori pembangunan ekonomi daerah berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika dibuat suatu ringkasan, teori pembangunan ekonomi daerah menyatakan bahwa, pembangunan daerah ditentukan oleh faktor-faktor diantaranya: sumberdaya alam, tenaga kerja, investasi, intrepreneursip, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan

bantuan-bantuan pembangunan (Arsyad, 1999)

Strategi Pertumbuhan Ekonomi Tidak Seimbang

Berdasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, negara-negara di dunia sekarang ini biasanya dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu negara-negara maju (*developed countries*) dan negara-negara sedang berkembang (NSB). Todaro (1994) mengemukakan karakteristik umum NSB sebagai berikut: 1) tingkat kehidupan yang rendah, 2) tingkat produktivitas rendah, 3) tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi, 4) tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu, 5) ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer, dan 6) kekuasaan, ketergantungan, dan vulnerabilitas dalam hubungan internasional.

Karakteristik NSB di atas apabila dikaitkan dengan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi, maka dapat ditarik suatu pemikiran bahwa NSB akan menghadapi masalah dalam melakukan proses pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi masalah tersebut NSB memerlukan perencanaan dan strategi pertumbuhan ekonomi, agar dengan keterbatasan sumberdaya tersebut NSB mampu mengoptimalkan dengan baik.

Strategi pertumbuhan ekonomi yang kebanyakan digunakan oleh NSB adalah "strategi pertumbuhan ekonomi tidak seimbang". Strategi pertumbuhan ini dikemukakan oleh Hirschman dan Streeten. Menurut mereka, pembangunan tidak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan tidak seimbang ini menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 1) secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang, 2) untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia, dan 3) pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan (*blottlenecks*) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.

Pembangunan tidak seimbang ini juga dianggap lebih sesuai untuk dilaksanakan di NSB karena negara-negara tersebut menghadapi masalah kekurangan sumberdaya. Dengan melaksanakan program pembangunan tidak seimbang maka usaha pembangunan pada suatu periode waktu tertentu dipusatkan pada beberapa sektor yang mendorong penanaman modal yang terpengaruh (*induced investment*) di berbagai sektor pada periode waktu berikutnya. Oleh karena itu, sumberdaya-sumberdaya yang sangat langka itu dapat digunakan secara lebih efisien pada setiap penggunaan.

Persoalan pokok yang dianalisis Hirschman dalam teori pertumbuhan tidak seimbang adalah bagaimana caranya untuk

menentukan proyek yang harus didahulukan pembangunannya, di mana proyek-proyek tersebut memerlukan modal dan sumberdaya lainnya melebihi modal dan sumberdaya yang tersedia, agar penggunaan berbagai sumberdaya yang tersedia tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Diilhami adanya persoalan yang timbul pada strategi pertumbuhan ekonomi tidak seimbang tersebut, maka secara spasial telah mendorong munculnya pemikiran tentang teori-teori lokasi pertumbuhan, diantaranya adalah: teori lokasi pertumbuhan dan teori kutub pertumbuhan.

Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah

Pembangunan ekonomi yang selama ini telah menghasilkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Namun hasil pertumbuhan tersebut ternyata belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan atau berbagai golongan penduduk seluruh daerah atau dengan kata lain belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan ketimpangan antar daerah. Mengurangi ketimpangan daerah (*regional imbalanced*) merupakan salah satu tema pokok dalam pembangunan wilayah (*regional development*).

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa melainkan juga terjadi antar Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi, 1997).

Satu kelompok teoritis pembangunan wilayah berpendapat bahwa kesenjangan wilayah adalah suatu proses yang akan terjadi dan tidak dapat dihindari seiring dengan kemajuan dalam pembangunan sosial ekonomi neara, sampai kemudian menurun kembali dengan sendirinya setelah mencapai titik balik (*polarization reversal*). Kuznets (1955) yang telah menganalisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Penelitian inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik. Menurut Oshima (1992) banyak negara-negara Asia nampaknya mengikuti kurva Kuznets dalam kesejahteraan pendapatan.

Pengertian wilayah daerah lebih terbuka dibandingkan dengan wilayah nasional, bila dilihat dari pergerakan sumberdaya antar daerah

lebih bebas dibandingkan dengan pergerakan sumberdaya antar negara. Pergerakan sumberdaya-sumberdaya yang lebih bebas maksudnya, karena halangan berupa tarif, kuota, lisensi ekspor hampir dikatakan tanpa hambatan dalam pergerakannya antara daerah. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja, dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Bertitiktolak dari kenyataan itu, Ardani (1992) mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan situ sendiri.

Menurut Williamson (1965), kesenjangan antar daerah yang semakin membesar disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya *pertama*, adanya migrasi tenaga kerja antar daerah bersifat selektif yang pada umumnya para migran tersebut lebih terdidik, mempunyai keterampilan yang tinggi, dan masih produktif. *Kedua*, adanya migrasi kapital antar daerah, adanya proses aglomerasi pada daerah yang relatif kaya menyebabkan daya tarik tersendiri bagi investor pada daerah lain yang berakibat terjadinya aliran kapital ke daerah yang memang telah terlebih dahulu maju. *Ketiga*, adanya pembangunan sarana publik pada daerah yang lebih padat dan potensial berakibat mendorong terjadinya kesenjangan/ketimpangan antar daerah lebih besar. *Keempat*, kurangnya keterkaitan antar daerah yang dapat menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak pada semakin besarnya kesenjangan/ketimpangan yang terjadi.

Menurut Myrdal (1957) perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (lihat Arsyad, 1999).

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan.
2. Mengetahui potensi ekonomi masing-masing kecamatan yang ada di

wilayah Kabupaten Pasuruan.

3. Mengetahui ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah kabupaten Pasuruan dalam menentukan kebijakan, khususnya mengenai pengembangan potensi kecamatan di wilayah administratif kabupaten Pasuruan.
2. Sebagai bahan referensi atau perbandingan bagi peneliti berikutnya, khususnya dalam penyempurnaan model analisis pertumbuhan kecamatan. Serta dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan strategi pengembangan wilayah kecamatan dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pasuruan.
3. Sebagai bahan informasi bagi investor, dalam menentukan lokasi investasi di wilayah kabupaten Pasuruan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya penelitian ini tergolong pada penelitian terapan atau sering disebut *applied research*. Menurut Mudrajad (2003) *applied research*, merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Ada tiga macam contoh dari penelitian terapan, yaitu:

- Penelitian Evaluasi (*evaluation research*) adalah penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan.
- Penelitian dan Pengembangan (*research and development*) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut mempunyai kualitas yang lebih tinggi.
- Penelitian tindakan (*action research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk segera dipergunakan sebagai dasar tindakan memecahkan masalah yang ada.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini melakukan pengamatan pada pola pertumbuhan ekonomi di 24 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Adapun kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Pasuruan terdiri dari kecamatan: Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok, dan Nguling

Alat Analisis

Studi ini menggunakan beberapa metode analisis dalam menjawab tujuan yang akan dicapai. Alat analisis tersebut meliputi: Tipologi Klassen, Analisis Location Quotient, Shift Share, Entropi Theil dan Sistem Informasi Geografi (SIG),

1) Analisis Location Quotient (LQ)

Teknik analisis ini digunakan untuk menentukan kategori suatu sektor termasuk dalam sektor basis atau bukan basis. Formula dari teknik analisis tersebut adalah: (Iwan Jaya Azis, 1993)

$$LQ_i = \frac{VA'_i / VA'_j}{PDRB'_i / PDRB'_j}$$

Keterangan:

LQ'_i = Location Quotient sektor i di daerah J

VA'_i = Nilai tambah sektor i di daerah J

VA'_j = Nilai tambah sektor i di tingkat kabupaten

$PDRB'_i$ = Produk Domestik Regional Bruto di daerah J

$PDRB'_j$ = Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten

Dari hasil perhitungan yang diperoleh, dapat diartikan dalam dua kategori, yaitu:

1. Bila nilai LQ lebih kecil atau sama dengan 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut bukan sektor basis.
2. Bila nilai LQ lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis.

2) Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan masing-masing kecamatan di kabupaten Pasuruan. Formulasi alat analisis ini sebagai berikut:

Gambar 1.
Matrik Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen

PDRB per kapita (y) Laju Pertumbuhan (r)	$y_i < y$	$y_i > y$
	$r_i > r$	Daerah berkembang Cepat

$r_i < r$	Daerah relatif Tertinggal	Daerah maju tapi Tertekan
-----------	---------------------------	---------------------------

Sumber : Sjafrizal, (1997)

Keterangan : r_i = laju pertumbuhan PDRB kecamatan i
 r = laju pertumbuhan total PDRB kabupaten
 y_i = pendapatan perkapita kecamatan i
 y = pendapatan perkapita kabupaten

3) Analisis Distribusi Frekuensi

Alat analisis ini digunakan untuk mengelompokkan atau mengklaster pendapatan per kapita masyarakat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Dengan mengetahui klaster pendapatan per kapita masing-masing kecamatan, maka akan terlihat kesenjangan pendapatan per kapita antar kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Langkah-langkah untuk menentukan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut: Pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kedua, membuat kategori atau kelas data. Untuk menentukan jumlah kategori atau kelas dapat digunakan rumus Sturges yaitu:

Jumlah Kategori (k) = $1 + 3,322 \text{ Log } n$

Ketiga, Menentukan interval kategori. interval kategori atau kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori atau kelas. Untuk menentukan interval kategori ditentukan dengan menggunakan rumus senagai berikut:

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai terbesar} - \text{Nilai terkecil}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

HASIL PENELITIAN

Kondisi Ekonomi Kabupaten Pasuruan

Untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari seberapa besar jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan. Selain mengetahui besarnya jumlah PDRB, kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan juga bisa dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dan kelompok sektor ekonomi terhadap total PDRB. Dengan mengetahui kontribusi tersebut kita secara tidak langsung bisa mengetahui bagaimana struktur perekonomian Kabupaten Pasuruan. Berikut kontribusi sektor dan kelompok sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pasuruan terhadap total PDRB Kabupaten Pasuruan.

Tabel 1.
PDRB Kabupaten Pasuruan dan Kontribusi Masing-Masing Sektor Tahun
2000-2003

No	Sektor/Sub-sektor	PDRB			KONTRIBUSI			Rata-rata
		2001	2002	2003	2001	2002	2003	
	PRIMER							
	1 Pertanian	420.123,20	430.756,52	440.649,98	27,91	27,24	27,07	27,41
	2 Pertambangan & Pengalihan	419,657,19	439,219,34	450,151,02	27,58	27,20	27,04	27,28
	3	466,01	517,15	498,05	0,01	0,01	0,01	0,01
	SEKUNDER							
	3 Industri Pengolahan	632.211,09	676.619,40	691.651,62	42,03	42,75	42,59	42,43
	4 Listrik & Air Bersih	582.185,65	621.031,96	633.325,44	38,63	39,27	38,51	38,95
	5 Bangunan	38.517,30	43.056,78	44.593,29	2,56	2,72	2,74	2,67
	6	11.525,94	12.516,66	13.722,51	0,77	0,79	0,84	0,80
	TERSIER							
	6 Perdagangan, Hotel & Restoran	452.333,99	474.184,01	495.285,28	30,06	29,98	30,43	30,17
	7 Pengangkutan & Komunikasi	171.915,18	181.160,43	191.016,72	11,42	11,43	11,74	11,54
	8 Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	62.457,16	69.143,02	72.188,15	4,15	4,27	4,44	4,32
	9 Jasa Jasa	41.610,39	43,939,15	46,321,12	2,76	2,78	2,55	2,80
	0	176.249,65	179.980,46	185.769,29	11,05	11,28	11,41	11,51

Sumber: PBS Propinsi Jawa Timur 2003 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat ringkasan dari peran masing-masing sektor terhadap PDRB. Peran sektor di atas dikelompokkan menjadi 3 sektor pokok, yaitu sektor primer, sekunder dan tertier. Kelompok Sektor primer mencakup sektor pertanian, sektor pertambangan dan Galian. Peranan kelompok sektor primer memberikan kontribusi ketiga setelah kelompok sektor sekunder dan tersier yaitu rata-rata memberikan kontribusi sebesar 27,41%, peran sektor ini didominasi sektor pertanian yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 27,38%.

Kelompok Sektor Sekunder mencakup sektor industri pengolahan, sektor Listrik dan Air Bersih, dan sektor Bangunan. Kelompok Sektor ini memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan, yaitu rata-rata hanya sebesar 42,43%. Peran kelompok sektor ini didominasi oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 38,95% selama 3 tahun terakhir.

Kelompok Sektor Tertier yang terdiri dari sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-Jasa. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor sekunder terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan yaitu sebesar 30,17%. Peran kelompok sektor ini didominasi sektor Perdagangan, Hotel & Restoran yang memberikan kontribusi sebesar 11,54% dan sektor jasa-jasa yang memberikan kontribusi sebesar 11,51%.

Selain melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten Pasuruan, untuk mengetahui kondisi ekonomi Kabupaten Pasuruan dapat juga dilihat dari kontribusi masing-masing Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kecamatan. Dengan mengetahui kontribusi PDRB masing-masing kecamatan kita bisa menganalisa kekuatan ekonomi secara spasial di Kabupaten Pasuruan.

Berikut ini adalah PARB masing-masing Kecamatan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan. .

Tabel 2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Masing-Masing Kecamatan
Di Wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	PDRB	Kontribusi
1	Purwodadi	61,346.49	3.80
2	Tutur	59,937.10	3.68
3	Puspo	28,031.36	1.72
4	Tosari	51,889.67	1.96
5	Lumbang	39,015.64	2.40
6	Pasrepan	51,712.69	3.18
7	Kejayan	70,350.38	4.32
8	Wonorejo	49,748.69	3.06
9	Purwasari	71,950.10	4.42
10	Pripan	79,256.11	4.87
11	Sukorejo	88,099.55	5.41
12	Pandaan	112,539.69	6.91
13	Gempol	142,563.32	8.76
14	Beji	186,955.10	11.49
15	Bangil	88,300.56	5.43
16	Rembang	103061.42	6.33
17	Krajan	64785.18	3.98
18	Pohjentrek	29007.78	1.78
19	Gondangwetan	45817.68	2.82
20	Rajoso	35107.55	2.16
21	Winongan	36,549.66	2.25
22	Graji	54,658.24	3.36
23	Lekok	36,241.80	2.23
24	Nguling	60,171.12	3.70
	Kabupaten Pasuruan	1,627,597	100

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kecamatan yang memberikan kontribusi PDRB terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan adalah Kecamatan Beji yang kemudian disusul oleh Kecamatan Gempol dan Pandaan. PDRB Kecamatan Beji memberikan kontribusi sebesar 11,49% terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan, sementara Kecamatan Gempol dan Kecamatan Pandaan masing-masing memberikan kontribusi sebesar 8,76% dan 6,91%.

Sedangkan kecamatan yang memberikan kontribusi PDRB paling rendah terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan adalah Kecamatan Puspo dan Kecamatan Pohjentrek. Kedua kecamatan ini masing-masing hanya memberikan kontribusi sebesar 1,72% dan 1,78% terhadap total PDRB Kabupaten Pasuruan.

Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan

Pola pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi masing-masing kecamatan berdasarkan

karakteristik pertumbuhannya dengan karakter pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan selama tiga tahun terakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan struktur ekonomi adalah melihat masing-masing sektor yang di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Pola Pertumbuhan Ekonomi

Alat analisis yang digunakan untuk menentukan pola pertumbuhan ekonomi masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan adalah Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klasen digunakan untuk mengetahui klasifikasi kecamatan berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita kecamatan. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horisontal, daerah dalam hal ini kecamatan yang diamati dapat dibagi menjadi empat pola atau klasifikasi/golongan, yaitu: kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), kecamatan maju tapi tertekan (*high income but low growth*), kecamatan yang berkembang cepat (*high growth but low income*), dan kecamatan yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Kuncoro dan Aswandi, 2002).

Kriteria yang digunakan untuk menggolongkan kecamatan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dari masing-masing kecamatan. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rata-rata Kabupaten Pasuruan.

Pertumbuhan PDRB dan perkembangan Pendapatan per Kapita masing-masing kecamatan selama kurun waktu 2001 s/d 2003, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.

Laju Pertumbuhan, Pendapatan Per Kapita, dan Pola Pertumbuhan Masing-Masing Kecamatan

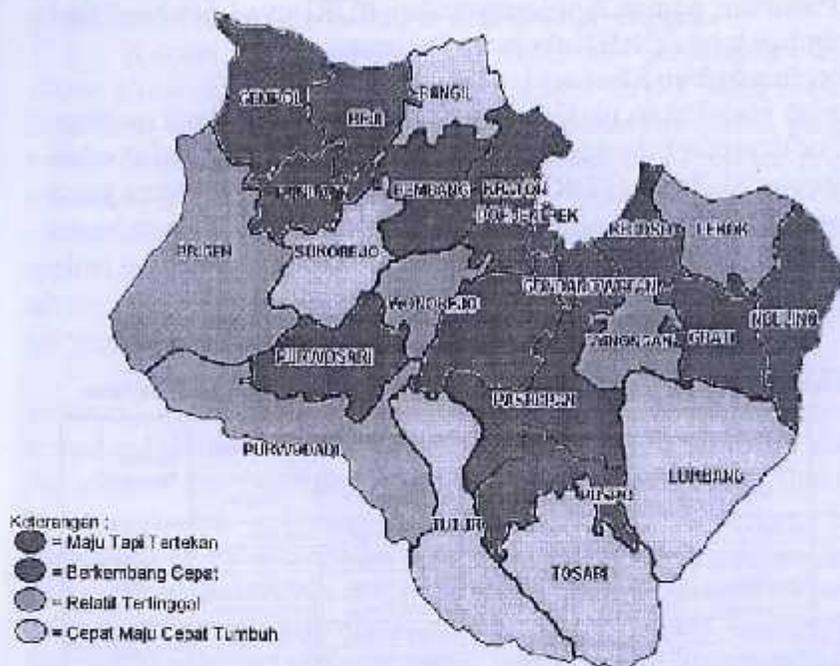
No	Kecamatan	Per Kapita	Pertumbuhan	Kreteria
1	Purwodadi	2.490,260	-14.95	Relatif Tertinggal
2	Tutur	5,011,606	13.8	Cepat Maju Cepat Tumbuh
3	Puspo	3,145,403	11.74	Berkembang cepat
4	Tosari	6,568,296	8.12	Cepat Maju Cepat Tumbuh
5	Lumbang	3,234,995	9.12	Cepat Maju Cepat Tumbuh
6	Pasrepan	3,018,942	13.74	Berkembang cepat
7	Kejayan	3,371,591	7.08	Cepat Maju Cepat Tumbuh
8	Wonorejo	2,619,338	3.8	Relatif Tertinggal
9	Purwosari	2,851,724	7.38	Berkembang cepat
10	Prigen	2,787,428	0.6	Relatif Tertinggal
11	Sukorejo	3,492,654	8.86	Cepat Maju Cepat Tumbuh
12	Pandaan	3,619,105	1.97	Maju Tapi Tertekan
13	Gempol	3,450,697	3.46	Maju Tapi Tertekan
14	Deji	6,485,789	3.47	Maju Tapi Tertekan

15	Bangi	3.329.124	7.04	Cepat Maju Cepat Tumbuh
16	Rembang	4.042.981	3.42	Maju Tapi Tertekan
17	Kraton	1.943.855	6.74	Berkembang cepat
18	Pohjentrek	2.759.454	60.97	Berkembang cepat
19	Gondangwetan	2.676.107	7.65	Berkembang cepat
20	Rejoso	2.733.746	10.24	Berkembang cepat
21	Winongan	2.672.291	-13.35	Relatif Tertinggal
22	Graji	2.259.892	5.07	Berkembang cepat
23	Lekok	1.335.153	-5.97	Relatif Tertinggal
24	Nguling	3.238.744	0.96	Maju Tapi Tertekan
Kabupaten Pasuruan		3.205.975	3.94	

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa pola pertumbuhan ekonomi kecamatan di Kabupaten Pasuruan dapat diklasifikasikan menjadi empat pola yaitu: 1) Pola kecamatan berkembang cepat, sebanyak 8 kecamatan; 2) Pola Kecamatan maju dan cepat tumbuh, sebanyak 6 kecamatan; 3) Pola kecamatan relatif tertinggal, sebanyak 5 kecamatan; dan 4) Pola kecamatan cepat maju tapi tertekan, sebanyak 5 kecamatan.

Gambar 2.

Peta Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Pola Pertumbuhan Masing-Masing Kecamatan



Kecamatan yang tergolong pada pola kecamatan "berkembang kecapat" adalah kecamatan: 1) Puspo; 2) Pasrepan; 3) Purwosari; 4)

Kraton; 5) Pohjentrek; 6) Gondangwetan; 7) Rejoso; dan 8) Grati. Ciri kecamatan yang mempunyai klasifikasi ini adalah kecamatan yang pertumbuhannya cepat namun pendapatan per kapitanya masih dibawah pendapatan per kapita Kabupaten Pasuruan.

Kecamatan yang tergolong pada pola kecamatan "cepat maju dan cepat tumbuh" adalah kecamatan: 1) Tutur; 2) Tosari; 3) Lumbang; 4) Kejayan; 5) Sukorejo; dan 6) Bangil. Kecamatan ini adalah kecamatan yang memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan lebih besar dari pada pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan kecamatan yang tergolong pada pola kecamatan "relatif tertinggal" terdapat 5 kecamatan yaitu kecamatan: 1) Purwodadi; 2) Wonorejo; 3) Prigen; 4) Winongan; dan 5) Lekok. Ciri kecamatan yang mempunyai klasifikasi ini adalah kecamatan yang pertumbuhannya rendah dan pendapatan per kapitanya juga rendah, bila dibandingkan dengan pertumbuhan dan pendapatan per kapita Kabupaten Pasuruan.

Sementara kecamatan yang tergolong pada pola kecamatan "maju tapi tertekan" adalah kecamatan: 1) Pandaan; 2) Gempol; 3) Beji; 4) Rembang; dan 5) Nguling. Kecamatan ini adalah kecamatan yang pendapatan per kapitanya lebih besar dari pendapatan per kapita kabupaten Pasuruan, namun laju pertumbuhan PDRBnya lebih kecil dari laju pertumbuhan total PDRB Kabupaten Pasuruan.

Struktur Pertumbuhan Ekonomi

Setelah melakukan perhitungan dan analisis kontribusi masing-masing sektor maupun kelompok sektor ekonomi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka dapat diperoleh gambaran struktur ekonomi masing-masing kecamatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawa ini.

Tabel 4.

Struktur Ekonomi Masing-Masing Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Kabupaten	Kontribusi Terbesar Thd PDRB		Kontribusi Terbesar Thd Kelompok Sektor			Struktur Ekonomi
	Sektor	Kelompok Sektor	Primer	Sekunder	Tersier	
Purwodadi	Pertanian	Primer	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	PST
Tudur	Pertanian	Primer	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	PTS
Pasopo	Pertanian	Primer	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	PST
Tosari	Perdagangan	Tersier	Pertanian	Industri Pengo.	Perdagangan	TPS
Lumbang	Pertanian	Primer	Pertanian	Industri Pengo.	Perdagangan	PST
Pasepan	Pertanian	Primer	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	PST
Kejayan	Pertanian	Primer	Pertanian	Industri Pengo.	Perdagangan	PST
Wonorejo	Pertanian	Primer	Pertanian	Industri Pengo.	Perdagangan	PST
Purwasari	Pertanian	Primer	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	PST
Prigen	Perdagangan	Tersier	Pertanian	Industri Pengo.	Perdagangan	TSP
Sukorejo	Industri	Sekunder	Pertanian	Industri Pengo.	Perdagangan	SPT

Kecamatan	Industri	Tersier	Pertanian	Industri Pengo.	Perdagangan	TSP
Gejop	Industri	Sekunder	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	SPT
Beji	Industri	Sekunder	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	SIP
Bangil	Perdagangan	Tersier	Pertanian	Industri Pengo.	Perdagangan	TSP
Sampang	Industri	Sekunder	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	SPT
Krajan	Industri	Sekunder	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	SPT
Pojorejo	Industri	Sekunder	Pertanian	Industri Pengo.	Perdagangan	SPT
Gondangwaran	Industri	Sekunder	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	STP
Rejosari	Industri	Sekunder	Pertanian	Industri Pengo.	Perdagangan	STP
Wingsan	Industri	Sekunder	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	STP
Grahi	Pertanian	Tersier	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	TSP
Lekok	Pertanian	Primer	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	PTS
Nging	Pertanian	Primer	Pertanian	Industri Pengo.	Jasa-jasa	PST
Keterangan:	P = Sektor primer		S = Sektor Sekunder		T = Sektor tersier	

Berdasarkan tabel di atas, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB kecamatan di kabupaten Pasuruan adalah sektor pertanian dan sektor industri. Terdapat 11 kecamatan yang sektor pertaniannya memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRBnya. Dan terdapat 10 kecamatan yang sektor industrinya memberikan kontribusi paling besar terhadap total PDRBnya. Sementara hanya ada tiga kecamatan yaitu kecamatan Tosari, Prigen dan Bangil yang kontribusi sektor perdagangannya paling besar terhadap PDRBnya. Hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor primadona atau leading sektor di Kabupaten Pasuruan.

Namun apabila dilihat dari kontribusi berdasarkan kelompok sektor ekonomi, ternyata kelompok sektor tersier yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Madura, kemudian disusul oleh kelompok sektor primer dan sekunder, kecuali Kabupaten Sampang. Untuk Kabupaten Sampang sektor primer yang mendepati urutan pertama dan kemudian disusul oleh sektor tersier dan sekunder. Untuk Kabupaten Sampang, kelompok sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar adalah kelompok sektor ekonomi primer

Sektor pertanian, bangunan, serta perdagangan, hotel, dan restoran, merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kelompok sektornya masing-masing. Kecuali untuk Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kelompok sektor Tersier adalah sektor jasa-jasa, sementara empat kabupaten lainnya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sementara untuk Kabupaten Sumenep terdapat perbedaan pada kontribusi di kelompok sektor Sekunder. Pada kelompok sektor tersebut, kontribusi terbesar untuk Kabupaten Sumenep adalah sektor industri pengolahan. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa aktivitas perekonomian di pulau Madura cenderung bersifat homogen. Dengan kata lain aktivitas ekonomi di pulau Madura didominasi oleh ketiga sektor tersebut.

Potensi Ekonomi Kecamatan

Setelah mengetahui Struktur dan pola pertumbuhan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka analisis selanjutnya adalah mengetahui sektor-sektor unggulan yang ada di masing-masing kecamatan tersebut. Sebagai dasar untuk menentukan sektor-sektor unggulan yang ada di masing-masing kecamatan, alat analisis yang digunakan adalah analisis *Location Quotient (LQ)*.

Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor-sektor apa saja yang termasuk dalam sektor basis. Sektor basis merupakan sektor-sektor yang mempunyai peranan kuat di suatu daerah bila dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain. Sektor ekonomi dikatakan kuat apabila sektor tersebut tidak hanya melayani pasar di daerahnya sendiri, tetapi juga mampu melayani pasar di daerah lain.

Dari hasil analisis LQ dapat diketahui suatu sektor dikatakan sektor basis atau bukan dengan kriteria sebagai berikut; sektor-sektor yang mempunyai angka $LQ > 1$ termasuk sektor basis, sedangkan bila angka $LQ < 1$ bukan termasuk sektor basis. Berdasarkan hasil analisis LQ dapat diketahui jumlah sektor-sektor basis di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan seperti terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5.

Jumlah Sektor dan Sub Sektor Unggulan Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Pasuruan

No	Kecamatan	Jumlah Sektor Unggulan	Jumlah Sub Sektor Unggulan
1	Purwodadi	3	11
2	Tutur	2	7
3	Paspo	2	6
4	Tosari	2	6
5	Lumbang	2	5
6	Pasrepan	3	8
7	Kejayan	2	8
8	Wonorejo	3	9
9	Purwosari	5	15
10	Prigen	5	15
11	Sukorejo	4	13
12	Pandaan	5	15
13	Gempol	6	17
14	Beji	1	6
15	Bangil	6	17
16	Rembang	1	4
17	Kraton	5	13
18	Pohjentrek	4	11
19	Gondangwetan	5	11
20	Rejoso	2	11
21	Winongan	3	8
22	Grati	6	15

33	Lekok	4	5
24	Nguling	4	10

Berdasarkan tabel diatas terlihat menunjukkan bahwa kecamatan yang paling banyak memiliki jumlah sektor unggulan adalah Kecamatan Gempol, Grati, dan Bangil. Ketiga kecamatan tersebut mempunyai 6 (enam) sektor unggulan, sementara yang mempunyai 5 (lima) sektor unggulan ada lima kecamatan yaitu: Kecamatan Purwoasri, Prigen, Pandaan, Kraton, dan Gondangwetan. Sedangkan yang paling sedikit mempunyai sektor unggulan adalah Kecamatan Beji dan Rembang, kedua kecamatan tersebut hanya mempunyai 1 (satu) sektor unggulan.

Apabila dilihat dari jumlah sub sektor unggulannya, kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor unggulan adalah kecamatan: Gempol dan Bangil, kedua kecamatan tersebut mempunyai 17 sub sektor unggulan. Dan yang mempunyai 15 sub sektor unggulan ada empat (empat) kecamatan yaitu kecamatan: Purwoasri, Prigen, Pandaan, dan Grati. Sedangkan kecamatan yang mempunyai sub sektor unggulan paling sedikit adalah kecamatan Puspo, Tosari, Beji, dan Lekok. Keempat kecamatan tersebut hanya mempunyai 6 sub sektor unggulan.

Apabila dilihat dari jumlah sektor dan sub sektor ungula ternyata hanya ada lima kecamatan yang mempunyai paling banyak sektor unggulan, dengan demikian bisa diambil kesimpulan awal bahwa aktivitas perekonomian kabupaten Pasuruan lebih banyak berada di lima kecamatan tersebut.

Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kecamatan

Gambaran ada tidaknya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan akan dilihat dari tingkat pendapatan per kapita masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah pendapatan per kapita masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 6.

Pendapatan Per Kapita Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Pasuruan

No	Kecamatan	Per Kapita
1	Lekok	1,335,153
2	Kraton	1,943,865
3	Grati	2,259,892
4	Purwodadi	2,490,260
5	Wanorejo	2,619,338
6	Gondangwetan	2,676,307
7	Winongan	2,677,291
8	Rejoso	2,733,746
9	Pohjentrek	2,759,454
10	Prigen	2,787,428

11	Purwasari	2,851,724
12	Pasrepan	3,018,942
13	Puspo	3,145,503
14	Nguling	3,238,744
15	Lumbang	3,284,995
16	Bangil	3,329,124
17	Kejayan	3,371,591
18	Gempol	3,430,697
19	Sukorejo	3,492,654
20	Pandaan	3,619,105
21	Rembang	4,042,961
22	Tutur	5,011,606
23	Beji	6,485,789
24	Tosari	6,568,296

Untuk mengetahui ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Pasuruan digunakan alat analisis distribusi frekuensi. Alat analisis ini untuk mengelompokkan atau mengklaster pendapatan per kapita masyarakat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Dengan mengetahui klaster pendapatan per kapita masing-masing kecamatan, maka akan terlihat kesenjangan pendapatan per kapita antar kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Langkah-langkah untuk menentukan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut: Pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kedua, membuat kategori atau kelas data. Untuk menentukan jumlah kategori atau kelas dapat digunakan rumus Sturges yaitu:

Jumlah Kategori (k) = $1 + 3,322 \text{ Log } n$

Dengan menggunakan rumus di atas maka diperoleh 5 (lima) lima kategori atau kelas pendapatan per kapita kecamatan, yaitu: 1) Sangat Rendah (SR); 2) Rendah (R); 3) Sedang (S); 4) Tinggi (T); dan 5) Sangat Tinggi (ST).

Setelah menentukan jumlah kategori, maka langkah selanjutnya adalah menentukan interval kategori. Interval kategori atau kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori atau kelas.

Dengan menggunakan rumus diatas maka diperoleh kelas interval kategori pendapatan per kapita masyarakat sebagai berikut:

Tabel 7.

Interval Kategori Pendapatan Per Kapita Kecamatan

No.	Batas Bawah Kelas	Interval Kelas	Batas Atas Kelas	Kategori
1	1,335,153	1,046,629	2,381,782	SR
2	2381781.6	1,046,629	3,428,410	R
3	3428410.2	1,046,629	4,475,039	S
4	4475038.8	1,046,629	5,521,667	T
5	5521667.4	1,046,629	6,568,296	ST

Berdasarkan interval kelas diatas maka, diperoleh kategori pendapatan per kapita masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan, seperti terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 8.

Kategori Pendapatan Per Kapita Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo

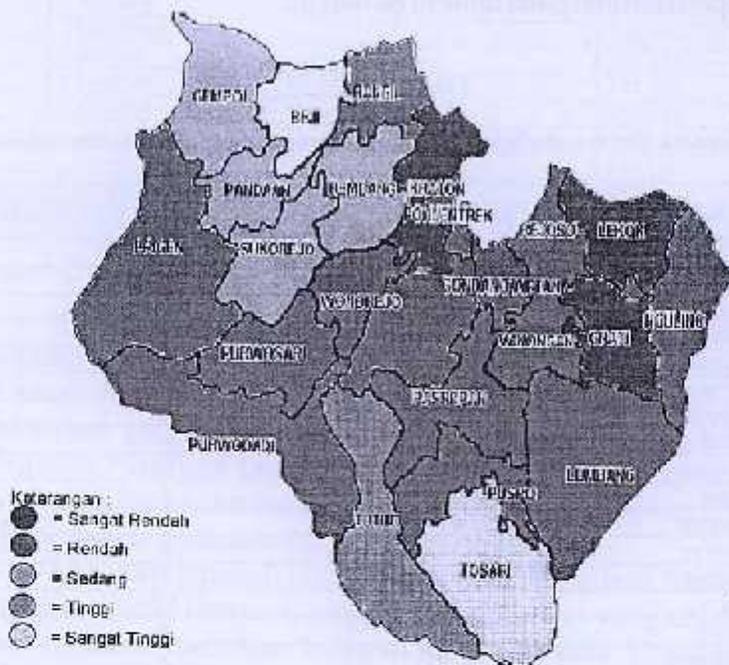
No	Kecamatan	Per Kapita	Kategori Pendapatan per Kapita
1	Purwadadi	2,490,260	R
2	Tutur	5,011,606	T
3	Paspo	3,145,403	R
4	Tosari	6,568,296	ST
5	Lumbang	3,284,995	R
6	Pasrepan	3,018,942	R
7	Kejayan	3,371,591	R
8	Wonorejo	2,619,338	R
9	Purwosari	2,851,724	R
10	Pri-gen	2,787,428	R
11	Sukorejo	3,492,654	S
12	Pandaan	3,619,105	S
13	Gempol	3,450,697	S
14	Beji	6,485,789	ST
15	Bangil	3,329,124	R
16	Rembang	4,042,961	S
17	Kraton	1,943,865	SR
18	Pohjentrek	2,759,454	R
19	Gondangwetan	2,676,307	R
20	Rejoso	2,733,746	R
21	Winongan	2,677,291	R
22	Grati	2,259,892	SR
23	Lekok	1,335,153	SR
24	Nguling	3,238,744	R

Keterangan:

SR = Sangat Rendah R = Rendah ST = Sangat Tinggi
S = Sedang T = Tinggi

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kecamatan yang tergolong mempunyai pendapatan per kapita Sangat Tinggi ada 2 (dua) yaitu kecamatan Tosari dan Beji. Dan yang tergolong tinggi hanya ada 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Tutur. Sementara yang tergolong tingkat pendapatan per kapita sedang ada 4 (empat) kecamatan, yaitu kecamatan: 1) Sukorejo, 2) Pandaan, 3) Gempol, dan Rembang.

Gambar 3.
Peta Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Tingkat Pendapatan Per Kapita Masing-
Masing Kecamatan



Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 17 kecamatan tergolong tingkat pendapatan rendah dan sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan masih lebih banyak yang tergolong rendah atau sangat rendah. Dengan kata lain masih terjadi kesenjangan antar kecamatan yang cukup signifikan di Kabupaten Pasuruan. Hal ini bisa terlihat dari gambar di atas, bahwa yang mendominasi warna peta tersebut adalah warna yang menyatakan tingkat pendapatan rendah dan sangat rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka ditemukan beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, pola pertumbuhan ekonomi masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan dapat diidentifikasi sebagai berikut: a) Kecamatan yang tergolong "kecamatan relatif tertinggal"; terdapat lima kecamatan b) Kecamatan yang tergolong "kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh" terdapat enam kecamatan; c) Kecamatan yang tergolong "kecamatan berkembang cepat" terdapat delapan kecamatan; dan d) Kecamatan

yang tergolong "kecamatan maju tapi tertekan" terdapat empat kecamatan.

2. Berdasarkan analisis sektoral, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kecamatan di Kabupaten Pasuruan adalah sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Namun apabila dilihat dari kontribusi berdasarkan kelompok sektor ekonomi, ternyata kelompok sektor sekunder dan primer yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
3. Kecamatan yang paling banyak mempunyai sektor unggulan adalah Kecamatan Purwoasri, Prigen, Pandaan, Kraton, dan Gondangwetan, sedangkan Kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor unggulan adalah Kecamatan Gempol dan Bangil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Pasuruan selama menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan perkapita per kapita antar kecamatan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya jumlah kecamatan (17 kecamatan) yang masih mempunyai tingkat pendapatan dengan kategori rendah dan sangat rendah.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa saran-saran yang diharapkan bisa menjadi masukan dalam menyempurnakan kebijakan di Kabupaten Pasuruan, antara lain:

1. Sektor Pertanian dan Industri pengolahan, merupakan sektor unggulan di setiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Jadi langkah yang paling urgen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kecamatan tersebut adalah menyediakan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan industri pengolahan.
2. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan mempunyai sektor unggulan yang relatif sedikit, sehingga membutuhkan kebijakan pemerintah untuk terus mengali potensi-potensi sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dalam upaya menggali potensi tersebut perlu melakukan kerjasama dengan berbagai badan atau perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya dalam bentuk riset dan pengembangan untuk mencari alternatif-alternatif pertumbuhan masing-masing kecamatan yang tertinggal.
3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah, mengacu pada konsep pertumbuhan kecamatan dengan mempertimbangkan potensi sektor ekonomi dan daya saing kecamatan. Sehingga tiap kecamatan mempunyai kekhasan daerah masing-masing berdasarkan potensi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Piter, Armida S. Alisjahbana, Nurry Effendy dan Boediono (2002), *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo (1989), *Beberapa Dimensi Ekonomi Regional*, Fakultas Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Ahmad, Mubariq (1993), "Irian Jaya dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLI, No. 4: 441-459.
- Arsyad, Lincoln (1999), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Baswir, Revrisond (1997), "Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, Juli: 24-32.
- Blakely, Edward J. (1989), *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, Sage Library of Social Research 168, Sage Publication.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. (1st ed.). Yogyakarta: UPPAMPYKPN.
- Sjafrizal (1997), "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat", *Prisma*, No. 3, Maret: 27-38.
- (2001), "Strategi dan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi", *Jurnal Penelitian Andalas*, Edisi Sosial-Ekonomi, Tahun XIII, No. 36, September: 1-26.
- Soepono, Parasetyo (1993), "Analisis Shift-Share: Perkembangan dan Penerapannya", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Tahun VIII, No. 1: 43-53.
- Sukirno, Sadono (1976), *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tulus, Tambunan (2000), *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*, Cetakan Pertama, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Vinod Thomas, Mansoor Dailami, dkk, (2000), *The Quality of Growth*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yusuf, Maulana (1999), "Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Aplikasi Model: Wilayah Bangka-Belitung", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLVII, No. 2: 219-233.
- Yuwono, Prpto (1999), "Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU 22/1999 dan UU 25/1999", *Kritis*, Vol. XII, No. 2, November: 41-62.